



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Webinar (series)

**“Transparansi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
kepada Publik Sebagai Upaya *Good Governance*”
dan Sosialisasi Laporan EITI Indonesia Ke-8 (*Flexible Report*)**

Rabu, 7 Juli 2021, Kementerian ESDM selaku Sekretariat EITI Indonesia mengadakan Webinar dengan tema “Transparansi Pemanfaatan Sumber Daya Alam kepada Publik sebagai Upaya *Good Governance*”. Kegiatan ini merupakan rangkaian webinar “Kemudahan berinvestasi di sektor ESDM serta Transparansi Data dan Informasi Industri Ekstraktif” yang sudah dilaksanakan di hari sebelumnya tgl 6 Juli 2021. Ini merupakan salah satu wadah komunikasi Pemerintah kepada Publik untuk mensosialisasikan implementasi transparansi informasi Industri Ekstraktif (EITI) di Indonesia terkait pengelolaan sumber daya alam dan pendapatan negara dari industri ekstraktif.

Dalam webinar ini juga dilakukan sosialisasi Laporan EITI ke 8 yang diterbitkan Maret 2021. Keberhasilan penyusunan Laporan EITI Indonesia ke 8 dalam bentuk *flexible report* juga merupakan kerja bersama Pemerintah Pusat, Daerah, Asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta peran aktif para Industri Ekstraktif sebagai upaya meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada sektor migas dan minerba. Acara ini diikuti lebih dari 400 peserta dari Kementerian/Lembaga, asosiasi, NGO, badan usaha, akademis dan masyarakat umum.

Mengawali webinar, Bapak Ir. Satya Widya Yudha, MSc, Anggota Dewan Energi Nasional, menyampaikan sejarah dan perkembangan EITI di Indonesia yang sudah dimulai sejak tahun 2007 dengan dukungan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kepada perwakilan EITI Indonesia. Dalam pembahasan laporan EITI mengacu pada standar EITI 2019 sebagai pedoman pelaksanaan EITI yang diberlakukan sejak 1 Januari 2020, dimana Laporan EITI sebelumnya menggunakan standar EITI 2016. Adanya perubahan signifikan antara standar EITI 2016 dan 2019 adalah kewajiban seluruh anggota pelaksanaan EITI untuk membuka data kontrak dan izin migas dan minerba yang baru. Khusus laporan yang dipublikasikan tahun 2020, karena dampak pandemic COVID 19 negara pelaksana EITI mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah diputuskan oleh Dewan EITI yaitu *flexible report*. Keikutsertaan Indonesia dalam EITI

telah memberikan dampak positif bagi pengelolaan sumber daya alam. Melalui EITI pemerintah dapat meningkatkan sistem *good governance* dan akuntabilitas public, perbaikan iklim investasi, dan membuka peluang untuk mengakses bantuan dana internasional dan memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia.

Erry Riyana Hardjapamekas, inisiator EITI Indonesia saat menjabat menjadi Wakil Ketua KPK RI turut serta meninjau persiapan penyusunan dasar hukumnya dan berharap dengan lahirnya EITI akan memberikan terobosan bagi adanya transparansi dan akuntabilitas di sektor Industri Ekstraktif. Indonesia pada tahun 2014 dinyatakan sebagai negara pertama di ASEAN yang dijadikan sebagai compliant country atau negara yang patuh terhadap standar EITI. Terakhir di tahun 2019, Indonesia mendapat predikat “meaningfull progress country”. EITI merupakan alat mencegah korupsi dan kuncinya adalah adanya Multi Stakeholders Forum. EITI Indonesia diharapkan tidak hanya memproduksi laporan yang berkualitas, ataupun mengembangkan portal-portal data dan informasi. Namun juga bagaimana bisa menjawab persoalan dan tantangan sektor ini yang kian dinamis dan kompleks.

Transparansi Penerimaan Negara dan Dana Bagi Hasil Daerah berdasarkan mekanisme penetapan perkiraan alokasi DBH berdasarkan PP 55/2005 dimana menganut prinsip transparansi yaitu melakukan rekonsiliasi data PNPB antara Kementerian terkait dengan Pemda dan informasi realisasi penyaluran DBH dan prinsip akuntabel dilaporkan dalam LKPP dan diperiksa oleh BPK. Dana Bagi Hasil bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertical (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil dengan prinsip *base on actual revenue* yaitu penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan (pasal 23 UU 33/2004). Ibu Mariana Dyah Savitri Kepala Sub Direktorat Dana Bagi Hasil Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan- Kemenkeu juga menyampaikan upaya keterbukaan informasi data DBH kepada Publik dan Pemda adalah bedah kerta kerja perhitungan realisasi DBH Migas dan Minerba sejak 2018 dengan melibatkan stakeholder dan K/L terkait, sosialisasi kebijakn DBH dan penyampaian informasi terkait HKPD dapat diakses pada <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> serta pengembangan bersama SOT Hulu migas.

Pelayanan Informasi Publik di Pertamina dapat melalui call center 135 dan E-PPID pada tahun 2020 dengan kanal eppid.pertamina.com, ujar Ibu Fajriyah Usman VP pf Corporate Communication PT. Pertamina (persero). Dalam kanal tersebut publik dapat mengakses informasi berkala, serta merta, setiap saat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Public. Implementasi para industri ekstraktif dalam Transparansi Data dan Informasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam kepada Publik dan Implementasi standar EITI yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) adalah pelaporan *annual* dan *sustainability report* untuk induk dan anak perusahaan (audited) melalui website, menyampaikan informasi laporan kontekstual via www.pertamina.com dan koordinator institusi terkait, komitmen gender dimana partisipasi pekerja perempuan di tingkat manajemen tahun 2019 naik 6% dari tahun

2018, serta koordinasi lintas fungsi lembaga (SKK Migas, BPH Migas) dan Kementerian baik BUMN maupun ESDM dalam proses penyampaian dan review.

Dampak industri ekstraktif terhadap masyarakat adat dan pendampingannya yang disampaikan oleh Aryanto Nugroho, Publish What You Pay Indonesia mengangkat isu masyarakat adat (masyarakat disekitar proyek) dalam konteks pemenuhan hak sebagai warga negara terkait transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Perlunya pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat adat pada saat Pemerintah melakukan kebijakan membuka wilayah tambang walaupun saat ini KESDM sudah memiliki data spasial sektor esdm pada ESDM One Map ada geoportal. esdm.go.id. Hal ini sangat penting karena dalam pelaksanaannya perlu melihat kepercayaan, ketergantungan masyarakat adat terhadap sumber daya alam tersebut sehingga masyarakat adat mampu berkolaborasi. Pemerintah harus dapat memberikan ruang kepada public untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi, melakukan klaim dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga dapat menyediakan availability dan akses informasi pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh Pemerintah agar masyarakat adat dilindungi pertambangan mampu mengakses data dan informasi.

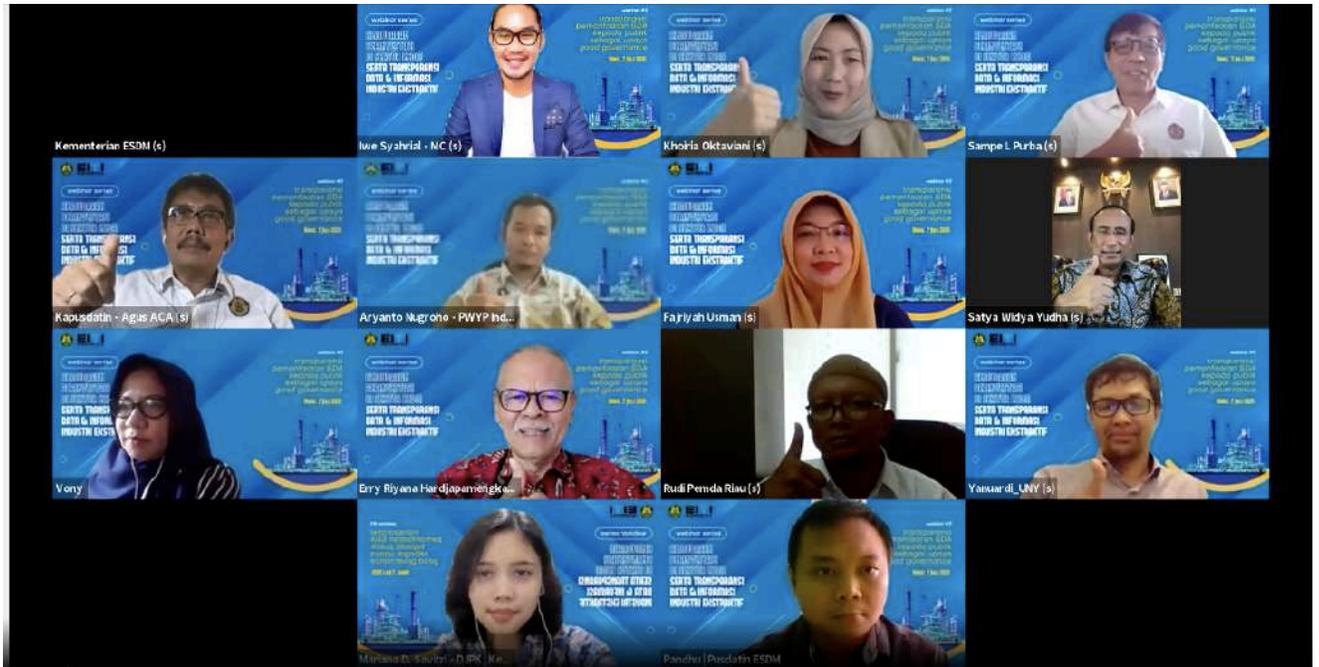
Yanuardi, akademisi Univ Negeri Yogyakarta memberikan perspektif EITI dimana diharapkan Pemerintah untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas dan dapat mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi terkait pengelolaan sumber daya alam dalam Forum Multistakeholder Group. Beberapa negara anggota EITI tidak hanya melaporkan sesuai standard tetapi juga *go beyond* seperti melaporkan pajak CO2 emission dan polusi. Saat ini, Indonesia masih mempunyai beberapa masalah yang harus diatasi agar dapat meningkatkan status validasi EITI menjadi satisfactory dan memperbaiki *governance quality di sector extractive industries* dan Indonesia memiliki beberapa potensi yang dapat dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan kualitas governance. Agar semua itu memerlukan komitmen yang kuat dan kerjasama dari semua stakeholders.

Rudi H Saleh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Riau menyampaikan isu terkait transparansi informasi untuk daerah yang dirasakan masih kurang terkait *cost recovery, entertainment* bagian negara, DMO, nilai kurs, komponen pengurang dan pungutan lainnya (seperti *fee* penjualan minyak mentah) serta isu alur bisnis dalam DBH SDA Migas yang sudah rutin dilakukan rekonsiliasi dengan daerah per 3 bulan dengan DJA dan dilakukan dengan audited dengan BPK. Namun masih ada beberapa data yang belum ditampilkan terkait komponen pengurang dan data DBH Migas untuk beberapa provinsi/ kabupaten/kota. Serta adanya isu perbedaan hasil perhitungan DBH Migas tahun 2019.

Dalam acara iniKapusdatin ESDM, Pak Agus Cahyono Adi menyampaikan simbolis buku pelaporan EITI Indonesia ke 8 yang sudah tersedia secara digital pada website eiti. esdm.go.id serta apresiasi peran aktif para industri ekstraktif sektor pertambangan

yang sudah ikut aktif dalam pengisian kuesioner sesuai dengan standar EITI sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pelaporan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah Indonesia dalam hal ini KESDM terus berupaya meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada sektor migas dan minerba. Upaya rekonsiliasi data yang dilaporkan oleh para industry ekstraktif pada EITI juga dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai pihak yaitu pemerintah, asosiasi, K/L terkait. Industri ekstraktif wajib menyampaikan PNBPN kepada pemerintah adapun untuk informasi pajak dilakukan pendekatan persuasif kepada industry ekstraktif untuk mendisclose data. Dan untuk pelayanan public di KESDM dapat menghubungi contact center 136. Laporan EITI ini juga tidak hanya pembuatan laporan, dimana sudah dilakukan upaya untuk *Quantity Assurance* dalam menuju integrasi data dalam *mainstreaming data*.

Berikut disampaikan juga bahan paparan dari narasumber yang dapat diunduh melalui link berikut <https://bit.ly/3hG02uX>, serta disampaikan record webinar Transparansi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kepada Publik Sebagai Upaya Good Governance pada link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=v6au2PUdAq0>.



PERUBAHAN STANDAR EITI 2016 KE 2019

Standar EITI 2019 sebagai pedoman baru pelaksanaan EITI yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020 (sebelumnya Standar EITI 2016). Perubahan signifikan:

- Kewajiban membuka data kontrak dan izin migas dan minerba yang baru.
- Kewajiban mempublikasikan keuangan perusahaan terkait lingkungan
- Kewajiban publikasi data tenaga kerja dan mendorong pelaksanaan gender serta transparansi commodity trading



- Prinsip EITI, yaitu penggunaan kekayaan SDA harus dilakukan dengan baik untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengelolaan kekayaan SDA dilakukan untuk kemaslahatan warga negara dan kepentingan pembangunan nasional.
- Pemerintah harus membuat laporan EITI didukung oleh Multi-Stakeholder Groups (MSG), mengikuti rantai nilai (value chain) industri ekstraktif yaitu Perizinan dan Kontrak, Produksi, Pengumpulan Pendapatan, Alokasi Pendapatan, dan Kontribusi Sosial dan Ekonomi.

www.dens.go.id

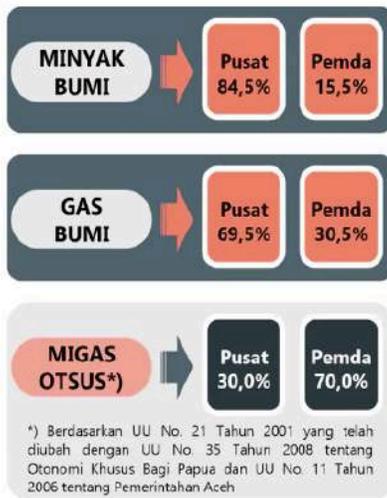
@dewan.energi

dewan.energinasional

dewan.energi

dewan.energi

PROPORSI PEMBAGIAN PNBP MIGAS



DASAR HUKUM PENGALOKASIAN DBH MIGAS

- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- PMK No. 139/PMK.07/2019 jo. PMK No. 233/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otsus

PENYEDIA DATA PERHITUNGAN DBH MIGAS

KEMENTERIAN ESDM

Lifting Minyak Bumi

- Tiap Daerah
- Tiap KKKS
- Tiap Jenis Minyak

Lifting Gas Bumi

- Tiap Daerah
- Tiap KKKS

KEMENTERIAN KEUANGAN

PNBP SDA Minyak Bumi

- Tiap KKKS
- Tiap Jenis Minyak

PNBP SDA Gas Bumi

- Tiap KKKS

Implementasi EITI

Pertamina sebagai salah satu tim MSG, siap memberikan dukungan data dan kebutuhan lainnya....

1 Pelaporan Annual & Sustainability Report Induk dan Anak Perusahaan (Audited) via website

Other EITI
 Laporan Tahunan 2017
 Laporan Keberlanjutan 2017
 Laporan Keberlanjutan 2018
 Laporan Keberlanjutan 2019
 Laporan Keberlanjutan 2020

*Laporan fiskal, operasional, dan CSR

2 Penyampaian Informasi Laporan Konstektual via web www.pertamina.com dan Koordinator Institut terkait

Crude and Products Procurement

Pertamina mengumpankan pembelian Minyak Mentah periode Oktober 2021 (Spot) Delivery melalui Platform...

Shipping Procurement

Invitation to Bid No. 1/004/Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Charter FOB Atamara OC Layanan 1B-20 July 2021

Informasi Impor Minyak Mentah dan Produk 2019

| MATERIAL DESCRIPTION | COUNTRY OF ORIGIN | TERMINAL/PORT | INCERTAIN | VOLUME | FAKSIK |
|----------------------|-------------------|---------------|-----------|---------|---------------|
| | | | | (M3) | (DWT) |
| CRUDE OIL, ARABIAN | Saudi Arabi | Sum | 100 | 816.911 | 1.025001/0.77 |
| CRUDE OIL, ASIAN | Indonesia | Sum | 0% | 496.194 | 1.000000/0.00 |

3 Komitmen Gender

1. Penyusunan perencanaan tenaga kerja (strategic workforce planning), perencanaan suksesi dan pemberian insentif jasa pekerjaan (remunerasi) maupun fasilitas/bantuan berdasar prinsip kesetaraan.
2. Keterbukaan dan kewajaran, serta menghindari praktik-praktik diskriminasi dan pelecehan di am bekerja.
3. Partisipasi pekerja perempuan di tingkat manajemen tahun 2019 meningkat 6% dari tahun 2018.

4 Kajian dan Legal Opinion dalam tim teknis kecil terkait keterbukaan informasi kontrak sesuai izin Kementerian terkait

5 Koordinasi lintas fungsi, lembaga (SKK Migas, BPH Migas) dan Kementerian baik BUMN maupun ESDM dalam proses penyampaian dan review

www.pertamina.com

@pertamina

135

Sejotang dan Danau Semenduk yang Hilang

Pedagi adalah sebutan bagi sebuah tempat yang disakrakan oleh penduduk desa. Tempat ini menjadi tempat beribada, baik itu memohon penyembuhan bagi orang sakit, meminta perlindungan dan keselamatan dalam kehidupan, serta mengucapkan syukur atas hasil panen yang baik.

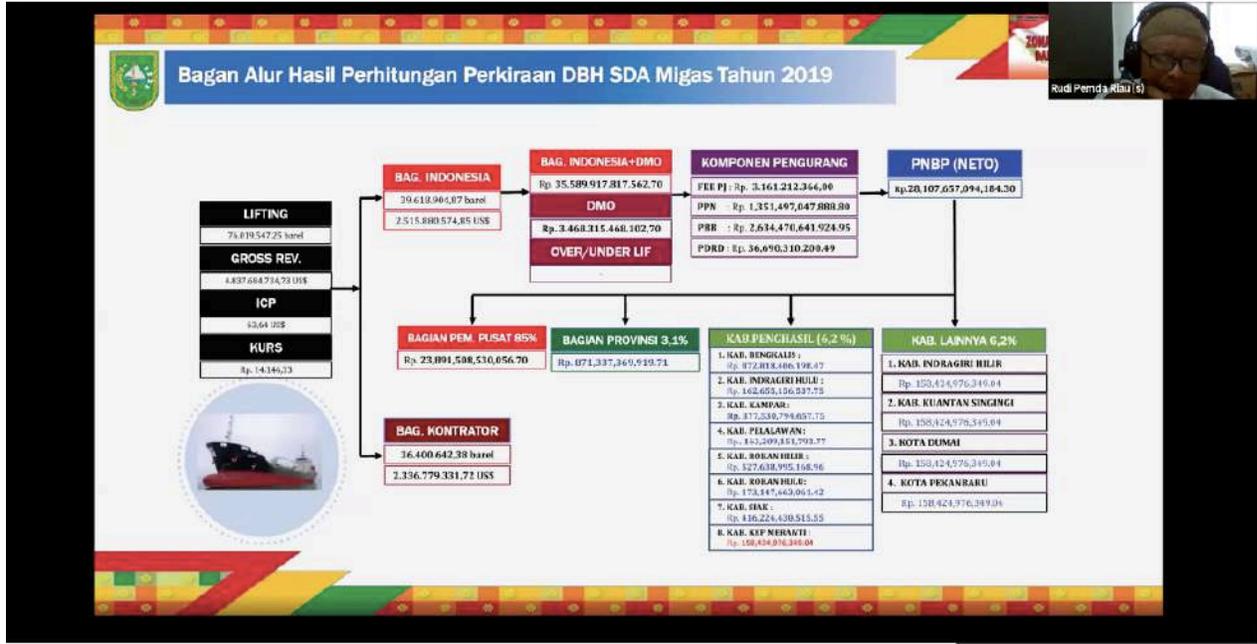
Di dalam pedagi terdapat makam pencahulu juga batu pemyujan. Warga percaya bahwa di setiap pedagi terdapat arwah leluhur yang menjadi penghuninya. Pedagi yang dianggap keramat mempunyai nama khas seperti Datar Pangiran Kuning Pembako, Lawang di Bukit Bijan, Nek Langka di Bukit Sato, Ngual di bukit Laet, Ratu Bungsu di bukit Bijan, Iera Kencana di bukit Danau Otong, serta Datar Pangiran Kuning dan Datar Panglima Raja di Pulir.

Gambar Pedagi di Bukit Sato.

Perempuan Perkasa di atas Perahu Malam

"Sekarang ikan-ikan lebih banyak di bagian tengah, karena di bagian dekat Isplan banyak timbun dari tambang, jadi kami harus mengayuh perahu lebih jauh lagi ke tengah supaya bisa menangkap ikan-ikan itu." Ujar Anita, Ketua Kelompok Perempuan Nelayan Sungai Bekat.

Aryanto Nugroho - P...



Transitions Animations Slide Show Review View Help

Font Paragraph Drawing Editing Voice Designer

16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

EITI

- EITI Global :
 - EITI secara bertahap mengembangkan standardnya.
 - EITI standard terus berkembang bukan hanya sekedar state revenue tetapi juga value chain → Standard 2013 and 2016 keterbukaan kontrak, Beneficial Ownership, cadastre; standard 2019 bertambah keterbukaan gender, isu lingkungan (Environmental Impact and Environmental Expenditure) dan commodity trading (encouraged)
 - Respon terhadap standard beragam (ada negara yang mengimplementasikan diatas standards, namun ada negara yang menerapkan minimal standard dan ada negara yang belum dapat membuka sesuai standard)
 - Beberapa negara anggota EITI tidak hanya melaporkan sesuai standard tetapi juga go beyond seperti melaporkan pajak CO₂ emission dan polusi seperti : Norwegia dan Armenia

